



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 6 Maret 2019/Periodik - 2018)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN AGAMA PEKANBARU

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HJ. HUSNI RASYID
2. Jabatan : HAKIM
3. NHK : 15674

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp.

1.935.000.000

1. Tanah Seluas 325 m2 di KOTA DUMAI , HASIL SENDIRI Rp. 35.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/103 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 154 m2/54 m2 di KOTA PEKANBARU , HASIL SENDIRI Rp. 450.000.000
4. Tanah Seluas 9240 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000
5. Tanah Seluas 720 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
6. Tanah Seluas 1908 m2 di BENGKALIS, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
7. Tanah Seluas 234 m2 di KEPULAUAN MERANTI, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp.

282.000.000

1. MOTOR, HONDA SUPRA SEPEDA MOTOR Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
2. MOTOR, YAMAHA VIXION SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 13.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT SEPEDA MOTOR Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000



4. MOBIL, TOYOTA RUSH MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI		
Rp. 165.000.000		
5. MOBIL, SUZUKI KARIMUN MINIBUS Tahun 2017, HASIL SENDIRI		
Rp. 93.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	7.000.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.228.142
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.351.228.142
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.351.228.142

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **18 Juni 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.